

Naturalisasi Perbudakan Sebagai Suatu Keadilan?

Ivan Th. J. Weismann

A. Mistifikasi atau Kesadaran Palsu tentang Perbudakan.

Suatu perdebatan yang berpusat pada sampai di mana kaum elite itu mampu memaksakan pandangan mereka sendiri tentang suatu tatanan sosial yang adil, tidak hanya terhadap *perilaku* kaum yang bukan elite, tetapi juga terhadap *kesadaran* mereka, oleh James C. Scott mencoba membuktikannya dalam karyanya yang berjudul *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*. Scott mengatakan bahwa adanya suatu kelompok tertentu yang diperas, dan selanjutnya pemerasan itu terjadi dalam hubungan di mana kekuatan menindas yang digunakan kaum elite dan/atau negara itu menjadikan satu-satunya perilaku yang dapat diamati dari kelompok yang diperas itu ialah sikap menerima tanpa dapat menyatakan ras tidak puas secara terbuka. Sikap menerima saja dari kelompok yang dieksploitasi itu, karena adanya suatu ideologi keagamaan atau sosial yang bersifat hegemonik, dalam kenyataan menerima situasinya itu sebagai bagian yang wajar dan bahkan dibenarkan dalam tatanan sosial itu. Penjelasan kepasifan ini sekurang-kurangnya mengasumsikan diterimanya secara fatalistik tatanan sosial itu dan mungkin pula bahkan ikut secara aktif baik dalam apa yang dikatakan kaum Marxis "mistifikasi" atau "kesadaran palsu". Secara khas hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kaum elite mendominasi tidak hanya alat produksi fisik, akan tetapi juga alat produksi simbolik, dan bahwa hegemoni simbolis ini memberi kesempatan kepada kaum elite untuk mengendalikan standar-standar yang akan digunakan untuk menilai pemerintahan mereka.

Scott mensitir Antonio Gramsci, kaum elite mengendalikan sektor-sektor ideologis dari masyarakat, seperti budaya, agama, pendidikan, dan media massa agar dapat merekayasa persetujuan untuk pemerintahan mereka. Upaya ini menciptakan dan menyebarkan suatu wacana, dan konsep-konsep yang mendampinginya, dengan menentukan standar dari apa yang benar, indah, bermoral, asli, dan sah, maka mereka membangun suatu iklim simbolik yang mencegah

kelas-kelas bawah untuk berpendapat bahwa jalan mereka bebas. Kaum proletar itu lebih diperbudak di tingkat gagasan daripada di tingkat perilaku. Sikap menerima dari kelas bawah ini, terutama di masyarakat pedesaan seperti di India, di mana sistem kasta yang ketat, suatu sistem yang amat dihormati itu, diperkuat pula oleh ajaran agama. Kasta rendah dikatakan menerima nasib mereka dalam hirarki agama Hindu itu dengan pengharapan untuk memperoleh ganjaran dalam kehidupan berikutnya (Scott, 2000, 53-54).

Sistem dominasi sosial seperti yang dibuktikan oleh Scott itu, sering kelihatan seolah-olah tidak dapat dihindari, demikian menurut logika, ia cenderung dianggap sudah kodrat/natural bahkan oleh orang yang dirugikan olehnya, dan ada kecenderungan untuk menganggap apapun yang kodrat/natural tentulah adil atau sah. Inilah yang dimaksud dengan tulisan ini tentang naturalisasi perbudakan sebagai suatu keadilan. Tulisan ini akan mendiskusikan tentang kondisi-kondisi yang tidak dapat terelakkan bagi kelas bawah sehingga menerima perbudakan sebagai suatu keadilan, sah, dan dapat dibenarkan.

B. Kondisi-kondisi yang tidak Terelakkan.

1. Kondisi Politik.

Mereka yang hidup di bawah hukum tirani secara umum kondisinya dipertimbangkan sebagai suatu bentuk perbudakan, yang tidak saja kehilangan kemerdekaan politik tetapi juga menderita penindasan atau perlakuan kekerasan oleh orang lain (Aristotle, *Ethics*, Bk.viii, ch.11, 413). Para filsuf seperti Plato, Aristoteles, hingga Rousseau, Hegel, dan Mill, menulis bahwa tirani selain sebagai ketidakwajaran pemerintahan juga tidak adil, tidak sah atau pelanggaran atas hukum. Kejahatan tirani adalah perbudakan atas mereka yang layak mendapat kemerdekaan, yang seharusnya memerintah diri mereka sendiri atau setidaknya seharusnya diperintah untuk kebaikan mereka sendiri, tidak dieksploitasi oleh seorang penguasa yang memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Kekuasaan tirani itu dapat pula disamakan dengan apa yang disebut oleh Robert Michels, "Hukum Besi Oligarki." Konsep Michels tentang hukum besi oligarki menunjuk pada "suatu kecenderungan umum bagi kekuasaan untuk menjadi terkonsentrasi pada tangan satu elit yang keputusan dan tindakannya secara bertahap diserahkan untuk mempertahankan kekuasaan mereka lebih daripada meningkatkan kepentingan rakyat jelata. Organisasi-organisasi demokratis yang

mulanya didirikan untuk kepentingan para anggotanya, lama-kelamaan tunduk pada kepentingan kelompok pada struktur pimpinan untuk memperkuat kekuasaan dan mempertahankan posisi elitnya. Meskipun ideologi mereka bersifat demokratis, tetapi struktur organisasi demokratis yang aktual cenderung diubah ke suatu bentuk oligarki" (Johnson, 1986, 180).

Montesquieu, begitupula dengan Aristoteles berpikir bahwa untuk ras manusia tertentu di bawah kekuasaan atau perbudakan dapat dibenarkan. Mill membuat perbandingan bahwa untuk bangsa pada tingkat perkembangan politik tertentu seperti orang barbar, berada di bawah kekuasaan diperlukan untuk suatu periode dalam persiapan mendapat hak kewarganegaraan (Mill, *Representative Government*: 340). Sama seperti di Indonesia pada masa rezim Orde baru, warga non pribumi dan mereka yang divonis terlibat dalam G 30 S PKI untuk jangka waktu periode yang cukup lama tidak dapat menikmati hak-hak kewarganegaraannya sepenuhnya secara hukum. Hanya saja bedanya menurut Mill perlakuan itu hanya bagi masyarakat barbar, tetapi di negara kita adalah mereka yang telah maju dalam pendidikan politiknya namun harus mengalami perlakuan yang sama.

Walaupun hubungan majikan dan budak secara esensial adalah ekonomik yaitu budak pada rumah tangga atau dalam industri keluarga, namun perbudakan memiliki aspek politik dalam arti bahwa beberapa orang tidak memiliki fungsi dalam negara kecuali untuk melayani orang lain. Aristoteles mengatakan status mereka bukan sebagai warganegara tetapi sebagai keharusan bagi negara. Mereka itu seharusnya adalah budak-budak yang melayani keinginan-keinginan individu, atau pekerja-pekerja yang adalah hamba-hamba masyarakat. Budak ekonomi melayani seorang majikan melalui pekerjaannya. Budak politik hidup di bawah seorang tirani. Aristoteles berpandangan bahwa hanya orang yang secara ekonomik merdeka yang mengalami kerugian jika kemudian diperbudak secara politik oleh tirani. Tidak ada orang merdeka, jika ia mampu melarikan diri, dapat bertahan di bawah pemerintahan tersebut. Selanjutnya Aristoteles mengatakan, tetapi orang barbar yang secara alamiah/natural atau pada kodratnya adalah budak tidak akan memberontak menentang tirani. Ada beberapa orang secara natural/kodrat adalah merdeka, tetapi orang barbar tidak ada penguasa secara kodrat/natural di antara mereka. Mereka pada kodratnya adalah masyarakat budak (Aristotle, *Politics*, Bk.I, ch.2: 445).

Keadilan atas perbudakan hanya berlaku bagi budak yang pada kodratnya/secara natural bukan budak oleh hukum atau paksaan oleh

tirani. Manusia yang pada kodratnya/secara natural budak adalah yang dilahirkan budak, atau lahir dalam kondisi perbudakan, atau orang yang lahir dengan keadaan yang mengkondisikan dirinya sebagai orang merdeka kemudian dibuat budak, karena dia dijual dalam perbudakan, atau karena untuk suatu alasan seperti kondisi-kondisi yang tidak dapat terelakkan dia harus menebus haknya untuk mendapat kemerdekaan. Yang menjadi pertanyaan adakah orang yang oleh kodrat/natural adalah budak? Jika tidak ada haruskah dianggap sebagai suatu keadilan tentang kondisi-kondisi yang membenarkan atau yang tidak dapat terelakkan membuat orang merdeka menjadi budak? Jika saja ada budak-budak oleh kodrat/natural, dapatkah dibenarkan untuk memperlakukan sebagai budak mereka yang oleh kodrat/natural adalah budak, sementara hewan-hewan liar saja tidak dapat dibenarkan diperlakukan tanpa perikemanusiaan?

2. Inferioritas

Berdasarkan persamaan hak, semua manusia pada kodratnya/secara natural adalah sama-sama manusia. Akan tetapi apakah ada beberapa orang oleh kodrat/natural adalah inferior atas orang lain dalam penggunaan akal mereka atau dalam kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan rasional mereka? Apakah inferioritas mencegah mereka dari mengarahkan hidup mereka sendiri atau bahkan keseluruhan pelayanan mereka hanya untuk memenuhi tuntutan kodrat/natural mereka itu? Jika demikian, akankah menjadi keuntungan bagi setiap manusia jika dia diarahkan oleh yang superior melalui melayani si superior itu agar dengan begitu dia dapat berpartisipasi dalam kebaikan yang lebih besar dan hal-hal yang lebih baik pun dapat dicapainya?

Inilah pertanyaan-pertanyaan yang Aristoteles hendak jawab ketika dia mengembangkan teori perbudakan kodrat/naturalnya. Aristoteles berkata, "Budak oleh kodrat dan majikan oleh kodrat dalam kenyataan memiliki kepentingan yang sama" (Aristotle, *Politics*, Bk.I, ch.3-7, 446). Keadilan terkandung dalam hubungan majikan dan budak ketika keduanya dihubungkan secara kodrat/natural oleh sebab itu Aristoteles mengkritik ketidakadilan atas semua bentuk perbudakan konvensional, yaitu yang tidak atas dasar kodrat/natural.

Aristoteles bertanya, "apakah ada seorang ditentukan oleh kodrat untuk menjadi budak dan kepadanya kondisi tersebut adalah bijaksana dan benar? Atau apakah semua perbudakan suatu kejahatan kodrat/natural? Aristoteles mengenal bahwa ada orang yang berpendapat

bahwa aturan tentang seorang majikan atas budak-budak bertentangan dengan kodrat, karena perbedaan antara budak dan orang merdeka hanya eksis oleh hukum, dan bukan oleh kodrat, dan suatu campuran dengan melibatkan kodrat di dalamnya adalah tidak adil" (Aristotle, *Politics*, Bk.I, ch.3-7: 447) Aristoteles kemudian mempertanyakan tentang suatu yang dipandang sebagai keadilan menjadikan budak-budak dari tawanan-tawanan yang diambil dalam perang padahal itu adalah kejahatan pada kodrat manusia dari tingkat tinggi superioritasnya dan mendatangkan kemalangan baginya dengan ditawan dan dijual. Hal yang sama juga dipertanyakan Aristoteles tentang perbedaan yang eksis antara pria dan wanita. Pria sebagai yang superior oleh kodrat, wanita adalah inferior. Yang satu mengatur, yang lainnya tunduk pada aturan.

Oleh sebab itu, Aristoteles menjelaskan, "mengenai yang satu secara kodrat/natural lebih rendah dari yang lain, adalah sama seperti jiwa dan tubuh atau sama seperti manusia dan hewan, yang lebih rendah adalah budak oleh kodrat/natural; maka lebih baik bagi mereka sebagai yang inferior bahwa mereka seharusnya di bawah aturan seorang majikan. Karena manusia sebagai makhluk rasional yang berpartisipasi dalam suatu prinsip rasional dan cukup memahami prinsip itu, berdasarkan prinsip itu tidak seharusnya dia adalah budak oleh kodrat; sementara hewan yang lebih rendah tidak dapat memahami prinsip rasional; karena mereka taat dengan insting bukan dengan rasio. Begitupula berlaku atas tubuh oleh jiwa. Semua akan mengenal bahwa kelas inferior seharusnya menjadi budak dari superior. Maka jelas bahwa beberapa orang adalah merdeka oleh kodrat dan yang lainnya budak oleh kodrat dan selanjutnya perbudakan tersebut adalah bijaksana dan benar" (Aristotle, *Politics*, Bk.I, ch.13, 454).

Rousseau menolak keadaan-keadaan yang membenarkan ketidakadilan tentang pengaturan manusia sebagai budak. Bagi Rousseau, paham bahwa beberapa orang adalah budak oleh kodrat, apakah itu di Asia atau di Eropa, adalah ilusi. Rousseau katakan, "bagi Aristoteles, tidak ada yang dapat menjadi lebih pasti dari pada bahwa setiap orang yang dilahirkan dalam perbudakan adalah untuk perbudakan. Bagi Rousseau pandangan Aristoteles ini berimplikasi bahwa budak-budak kehilangan segala hal karena keterikatan/keterbelengguan perbudakan mereka, termasuk keinginan mereka untuk menyingkir dari keterikatan tersebut. Oleh sebab itu menurut Rousseau, jika kemudian ada budak oleh kodrat, itu menentang kodrat. Pemaksaan dalam perbudakan pertama menjadikan mereka budak, dan kemudian

menimbulkan kepengecutan dalam diri mereka untuk menerima saja secara pasif kondisi tersebut” (Rousseau, *Social Contract*, 388)

Rousseau berpikir, “hal itu tidak masuk akal bagi para filsuf untuk mengenakan pada manusia kecenderungan perbudakan, hanya oleh karena budak-budak dalam pengamatan para filsuf itu dilihat menanggung beban dengan kesabaran; para filsuf itu gagal merefleksikan bahwa budak-budak itu memiliki kebebasan dengan nilai-nilai kebajikan dan tidak bersalah; nilai-nilai yang dikenal oleh para filsuf bangga pada mereka yang memiliki budak-budak itu” (Rousseau, *Inequality*: 356).

3. Hubungan kepemilikan

Menurut teori perbudakan kodrat, sebagaimana baik untuk budak memiliki seorang majikan begitu pula baik bagi majikan memiliki seorang budak. Selain itu budak adalah suatu properti/kepemilikan. Apakah oleh kodrat atau oleh institusi, seorang budak bukan miliknya sendiri dia adalah milik orang lain? Aristoteles berkata “dia boleh disebut milik orang lain yang juga adalah suatu kepemilikan” (Aristotle, *Politics*, Bk.I, ch.3-7, 447) Apakah ini berarti bahwa budak seluruhnya milik majikan, dalam semua yang dia miliki termasuk seluruh dirinya? Dia akan nampak milik majikannya sejauh dia adalah suatu kepemilikan; tidak secara keseluruhan (dalam dirinya sendiri sepenuhnya dan apa yang ia miliki) sejauh dia adalah manusia yang memiliki kemanusiaan.

Aristoteles mempertimbangkan perbedaan antara budak kodrat/natural dengan bentuk lain dari kepemilikan pribadi seperti kepemilikan atas hewan peliharaan atau kepemilikan alat-alat rumah tangga untuk tujuan produktif. Aristoteles bertanya, apakah budak memiliki suatu kebajikan yang melampaui dan lebih tinggi dari hanya sekedar kualitas pemberian pelayanan dan instrumental seperti yang terdapat pada alat dan hewan? Jika demikian dalam hal apa mereka berbeda dengan orang merdeka? Aristoteles menjawab dengan berkata bahwa “sejak budak adalah makhluk rasional nampak tidak beralasan untuk mengatakan mereka tidak memiliki kebajikan” (Aristotle, *Politics*, Bk.I, ch.13, 454). Tetapi sejak prinsip rasional dalam mereka adalah lemah dan hanya terdiri dalam kemampuan melaksanakan keputusan (bukan untuk membuat keputusan atau untuk mengenal konsekuensi keputusan yang mereka buat) budak akan memiliki suatu kebajikan sesuai dengan kemampuan/kapasitas yang ia miliki. Sebagai contoh, kebajikan yang secukupnya itu hanya mencegah dia dari kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya karena kebajikan yang ia miliki hanya perasaan pengecut

atau jika ia gagal, itu karena kebajikannya terbatas sehingga ia kehilangan pengendalian diri.

Tepatnya karena keterbatasan kompetensi dan kebajikannya sehingga budak membutuhkan dan menguntungkan baginya dengan memiliki seorang majikan. Aristoteles mimikirkan bahwa dia lebih baik diperbudak daripada dimerdekakan. Budak membagi dalam kehidupan majikannya dan hanya mencapai kebajikan dalam proporsi dia menjadi budak.

Aristoteles berkata: "budak tidak membagi kebahagiaan atau kebaikan dalam melayani berdasarkan suatu kehidupan kehendak bebas.... Tidak seorang pun memberikan pada seorang budak suatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan atau kebaikan bagi orang lain, kecuali budak itu memberikan padanya juga suatu yang untuk dibagi dalam kehidupan manusia. Hal yang dibagikan padanya itu pun datang dari bagian yang berasal dari majikan dan akhirnya hanya memberi kontribusi untuk kebahagiaan majikan. Walaupun budak dan majikan memiliki kepentingan yang sama, tetapi aturan yang budak harus hidupi ialah diterapkan utamanya dengan satu pandangan untuk kepentingan majikan semata" (Aristotle, *Politics*, Bk.I, ch.3-7, 447).

Doktrin Aristoteles tentang perbudakan kodrat/natural ini ditolak oleh mereka yang menegaskan persamaan fundamental pada semua manusia dalam kemanusiaannya pada umumnya, dan menuntut bahwa ketidaksamaan sebagai individu dalam talenta atau kapasitas, tidak seharusnya mempengaruhi status atau yang menentukan perlakuan atas mereka. Atas dasar ini, kaum Stoa Romawi dan teolog-teolog Kristen nampak setuju, begitu pula pemikir-pemikir moderen seperti Rousseau, Kant, Hegel, dan Mill bahwa semua manusia oleh kodratnya dilahirkan merdeka. Kant menulis, "kemerdekaan milik setiap orang dalam kebajikan dan kemanusiaannya. Persamaan yang dimiliki setiap orang terdiri dalam hal hak-haknya yang bebas dari ketergantungan pada orang lain. Semua orang yang memiliki hak untuk perlakuan yang sama nampaknya mengikuti prinsip bahwa kebahagiaan seseorang sama derajatnya dengan orang lain. Persamaan kebahagiaan bagi setiap orang melibatkan pula persamaan kemerdekaan" (Kant, *Science of Right*: 401).

4. Dosa

Walaupun para teolog seperti Agustinus dan Aquinas, menyangkal bahwa perbudakan dilembagakan oleh kodrat/natural, mereka nampaknya tidak menerima itu sebagai bertentangan dengan hukum kodrat/natural atau kehendak Allah. Maksudnya ialah bahwa jika

ketelanjangan adalah kodrat/natural manusia, karena kodrat/natural tidak memberikan manusia pakaian, tetapi seni yang menemukan pakaian, maka dapat dikatakan bahwa semua manusia oleh kodrat/natural adalah merdeka, karena perbudakan tidak dilembagakan oleh kodrat/natural, tetapi direncanakan oleh akal manusia dan untuk keuntungan kehidupan manusia. Institusi perbudakan, dalam arti seorang dimanfaatkan menjadi milik orang lain, nampaknya adalah kodrat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, sebagai suatu konsekuensi dosa asal. Jika manusia yang tinggal dalam keadaan tidak berdosa, maka seseorang akan memerintah orang lain untuk kebaikan orang yang diperintah itu, dan tidak seorangpun akan menjadi majikan bagi budak yang dimanfaatkan untuk kebaikan majikan. Masalah yang menyedihkan bagi seseorang ialah ketika ia mengambil keuntungan dari orang lain atas apa yang seharusnya menjadi keuntungan orang tersebut (Aquinas, *Summa Theologica*, Part I, Q.81, A.3, 431). Agustinus berkata, "setiap kekuasaan berimplikasi suatu penderitaan yang dibebankan kepada mereka yang tunduk/patuh. Penderitaan dari perbudakan nampaknya berimplikasi suatu kontradiksi dengan pandangan Aristoteles bahwa perbudakan tertentu yang sesuai dengan kodrat/natural adalah untuk keuntungan mereka yang tunduk/patuh. Agustinus berkata, oleh karena Allah yang menciptakan kita, secara kodrat/natural tidak seorangpun adalah budak atas manusia atau budak atas dosa. Keduanya adalah penghukuman karena dosa. Tetapi di antara kedua jenis perbudakan itu adalah lebih berbahagia menjadi budak atas manusia dari pada budak atas hawa nafsu; karena hawa nafsu mengatur dengan sia-sia hati manusia dengan kekuasaan yang paling lalim. Perbudakan sebagai akibat dari tirani hawa nafsu adalah suatu kekacauan yang diderita oleh manusia yang berakar dari kelemahan kodrat/natural manusia yang telah jatuh ke dalam dosa" (Agustine, *City of God*, Bk.xix, ch.15, 521).

5. Iklim

Menurut Montesquieu, bukan dosa, tetapi iklim adalah penyebab perbudakan dan pembedarannya. Walaupun dia berpikir bahwa, "keadaan perbudakan dalam kodratnya sendiri adalah buruk... tidak berguna baik bagi majikan dan budak. Tidak berguna bagi budak karena dia tidak dapat berbuat dengan motivasi kebajikan; tidak berguna bagi majikan karena dengan memiliki otoritas tidak terbatas atas budaknya dia secara tidak sadar membiasakan dirinya kepada semua keinginan kebajikan moral menjadi mesum, buruk, jahat, bengis, lalim, dan penuh hawa nafsu" (Montesquieu, *Spirit of Laws*, Bk.xv, 109).

Montesquieu seperti Hippocrates sebelumnya, menerima suku bangsa Asia sebagai budak oleh kondisi fisik kehidupan mereka." Montesquieu menulis, "pemerintahan di Asia adalah suatu semangat perbudakan yang belum dapat dihilangkan." Di bawah kelaliman pemerintahan di Asia, keseluruhan suatu bangsa hidup dalam perbudakan politik. Di negara-negara di mana iklim panas melemaskan tubuh dan membawa manusia menjadi begitu malas sehingga tidak ada yang lain kecuali ketakutan akan penghukuman yang dapat menuntut mereka untuk menjalankan kewajiban kerja keras, maka dalam hal ini perbudakan lebih dapat diterima" (Montesquieu, *Spirit of Laws*, Bk.xvii, 124).

6. Alasan Pendewasaan

Perdebatan tentang hak orang Eropa untuk memperbudak orang-orang Negro, Hegel memberi komentar bahwa, "hal itu adaiiah buruk ketika di tanah air mereka sendiri nasib mereka menjadi budak" (Hegel, *Philosophy of History*, Intro., 198). Walaupun Hegel berpikir bahwa orang Negro secara kodrat/natural diserahkan untuk perbudakan, dia menerima, "kondisi kodrat itu sendiri sebagai suatu ketidakadilan absolut. Untuk mengatasi ketidakadilan ini tidaklah mudah. Manusia tersebut harus didewasakan terlebih dahulu untuk kemerdekaannya, oleh sebab itu penghapusan perbudakan atas mereka harus secara gradual bukan secara tiba-tiba atau revolusioner" (Hegel, *Philosophy of History*, Intro., 199).

Mill juga memandang perbudakan sebagai suatu tahap dalam kebangkitan bagi bangsa tertentu dari kehidupan biadab ke kehidupan politik dan mempertahankan bahwa transisi dari kemerdekaan harus terjadi secara gradual. Mill berkata, "seorang disebut budak adalah karena keberadaannya yang belum dapat belajar menolong dirinya sendiri, namun dia sudah satu langkah dalam kemajuan dari suatu masyarakat biadab. Dia masih belum memiliki pelajaran pertama tentang kehidupan politik yang harus dicapainya. Dia hanya belajar untuk taat. Tetapi apa yang ia taati hanya suatu perintah langsung. Itu adalah karakteristik dari mereka yang lahir budak, yaitu tidak mampu menyesuaikan perbuatan mereka pada hukum atau aturan.... Mereka harus diajar memerintah diri sendiri, karena dalam tahap awal, kemampuannya hanya berbuat menurut perintah-perintah umum" (Mill, *Representative Government*, 340).

7. Kondisi Perang

Aristoteles mempertanyakan, tentang suatu konvensi bahwa apapun yang diambil dalam perang dianggap milik para pemenang, atau prinsip bahwa karena seseorang memiliki kuasa melakukan kejahatan dan superior melakukan kekerasan dengan kekuasaannya maka orang lain akan menjadi budaknya dan pelayannya. Perbudakan yang sesuai dengan prinsip kebiasaan perang ini dibenarkan oleh hukum. Hobbes dan Locke menentang pandangan yang dipertanyakan oleh Aristoteles itu. "Manusia pada kodratnya/secara natural adalah merdeka, walaupun mereka dapat secara aktual menikmati kemerdekaan hanya sebanyak kekuasaan yang mereka miliki untuk mempertahankan kemerdekaannya. Namun ketidaksamaan kodrat/natural dalam kekuasaan yang mereka miliki tidak lantas menetapkan suatu hak kodrat/natural pada mereka yang lebih berkuasa untuk memperbudak yang lebih lemah" (Locke, *Civil Government*: 340). Hobbes mengatakan, "hak majikan atau apa yang ia sebut *kekuasaan kelaliman* bergantung bukan hanya pada kemenangan dalam perang, tetapi pada suatu perjanjian di mana orang-orang yang kalah ingin menghindari kematian atas dirinya, maka dengan kerelaan dia membuat perjanjian bahwa sepanjang hidupnya dan kebebasannya atas seizinnya bersedia digunakan oleh orang-orang yang menang dalam perang itu menurut kesenangan mereka. Hanya setelah perjanjian itu dibuat, orang yang kalah adalah budak dan bukan sebelumnya.... Oleh karena itu bukan para pemenang perang yang memberi hak berkuasa atas orang-orang yang kalah perang, melainkan oleh perjanjian itu sendiri" (Hobbes, *Leviathan*, Part II, chap.20, 110).

Locke tidak setuju dengan Hobbes bahwa seorang dapat memberikan kepada yang lain hak untuk memperbudaknya melalui kontrak/perjanjian untuk menjadi budak demi menghindari kematian atas dirinya. "Seseorang yang tidak memiliki kuasa atas hidupnya sendiri tidak dapat oleh seizinnya sendiri atau kapasitasnya menyerahkan dirinya sendiri menjadi budak kepada orang lain... Dia yang tidak dapat berkuasa atas hidupnya sendiri, tidak dapat memberikan kepada yang lain kuasa atas hidupnya itu" ((Locke, *Civil Government*, ch.iv: 29). Kasus di antara orang-orang Yahudi di masa lampau, dapat menjual diri mereka sendiri dalam pelayanan untuk sementara waktu dalam rangka menebus hutang. Ini adalah jenis pekerjaan bisnis; bukan perbudakan; "sebab orang yang menjual dirinya itu bukan di bawah suatu kuasa absolut, sewenang-wenang, dan lalim, karena itu majikan tidak memiliki kuasa untuk membunuhnya, dan pada setiap waktu atau pada waktu

tertentu orang itu diberi jaminan untuk bebas dari pelayanannya" (Locke, *Civil Government*, ch.iv, 30). Aquinas setuju, "tidak ada orang Yahudi, dapat memiliki seorang Yahudi lain sebagai budak secara absolut, tetapi hanya dalam pengertian terbatas, sebagai sewaan untuk suatu waktu tertentu. Dalam hal ini hukum mengizinkan bahwa melalui tekanan kemiskinan seorang dapat menjual anaknya."

Perbudakan absolut, bagi Locke, tidak lain kecuali keadaan perang berlanjut antara pemenang yang sah dengan para tawanan. Locke pikir, "budak adalah mereka yang ditawan dalam perang yang adil dan benar, dan oleh hak kodrat/natural, mereka tunduk pada kekuasaan absolut dan yang sewenang-wenang dari tuan mereka. Perbudakan absolut ini berbeda dengan perhambaan melalui kontrak untuk mendapat upah. Perbudakan absolut ini berlaku bagi pemberontak/agresor yang lalim yang dikalahkan dalam perang oleh orang lain" (Locke, *Civil Government*, ch.vii, sect.85, 43).

Bertentangan dengan Locke dan Hobbes, begitu pula dengan Aristoteles, Rousseau menyangkal adanya keadilan dalam perbudakan oleh kodrat/natural, perbudakan oleh perjanjian/perizinan, dan perbudakan oleh perang. Rousseau menentang pemikiran Hobbes bahwa anak dari budak datang ke dunia ini sebagai budak pula, ini berarti seorang manusia yang datang ke dunia bukan seorang manusia. Oleh karena itu Rousseau beranggapan bahwa perbudakan bertentangan dengan kodrat dan perbudakan tidak dapat berada di bawah kewenangan hukum atau menjadi hak seseorang. Seseorang tidak dapat mengalienasi/memisahkan dirinya dari kemerdekaannya dengan menjual dirinya kepada perbudakan, karena melepaskan kemerdekaannya berarti melepaskan keberadaannya sebagai seorang manusia" (Rousseau, *Social Contract*, Bk.I: 389).

Dalam bahasa Kant, "suatu kontrak tentang suatu kelompok masyarakat yang melepaskan keseluruhan kemerdekaannya demi kemajuan bangsa lain, membuat dirinya berhenti menjadi seorang pribadi, dan konsekwensinya dia tidak memiliki kewajiban bahkan untuk mengamati kontraknya sendiri, dalam hal ini kontrak itu sendiri batal dan omong kosong" (Kant, *Science of Right*: 445). Aspek apapun tentang persoalan hak perbudakan, Rousseau menyimpulkan, "hak perbudakan adalah omong kosong dan batal dengan sendirinya, tidak saja karena tidak sah, tetapi juga karena tidak beralasan dan sia-sia. Kata *budak* dengan *hak* adalah saling bertentangan satu dengan yang lain" (Rousseau, *Social Contract*, Bk.I, 390). Jelas sia-sia dan omong kosong menuntut *hak* atas *budak*.

C. Penutup

Maraknya pembentukan partai-partai politik saat ini, yang mengaku selalu siap mengabdikan pada kepentingan-kepentingan masyarakat kelas bawah, ditanggapi dengan pesimisme oleh masyarakat kelas bawah itu sendiri. Oleh karena kaum elite tetap saja mengendalikan sektor-sektor ideologis dari masyarakat – seperti budaya, agama, pendidikan, dan media massa – dan karena itu dapat merekayasa persetujuan untuk kekuasaan mereka atas masyarakat kelas bawah. Dengan menciptakan dan menyebarluaskan suatu cakrawala wacana, dan konsep-konsep yang mendampinginya, dengan menentukan standar dari apa yang benar, indah, bermoral, asli dan sah, maka mereka membangun suatu iklim simbolik yang mencegah kelas-kelas bawah untuk berpendapat bahwa jalan mereka bebas. Sementara orang-orang terpelajar yang duduk dalam partai-partai politik justru bersikap ortodoks atas ideologi-ideologi yang dikendalikan oleh kaum elite itu. Karena itu jika “partai” ingin berpihak pada masyarakat kelas bawah, tugas utama “partai” bukan memimpin sebuah revolusi akan tetapi menghancurkan udara kotor simbolik yang telah menghalangi pemikiran revolusioner udara kotor itu salah satunya yang perlu dihentikan ialah tentang naturalisasi perbudakan yang selama ini diterima sebagai suatu keadilan, sah, dan dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, 1952, *The City of God*, Trans. by Marcus Dods, William Benton, Chicago.
- Aquinas, Thomas, 1952, *The Summa Theologica*, Trans. by Fathers of the-English Dominican Province, William Benton, Chicago.
- Aristotle, 1952, *Nicomachean Ethics*, Trans. by W. D. Ross, William Benton, Chicago.
- Aristotle, 1952, *Politics*, Trans. by Benjamin Jowett, William Benton, Chicago.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1952, *Philosophy of History*, Trans. by Sibree, William Benton, Chicago.
- _____, 1952, *Philosophy of Right*, Trans. by T. M. Knox, William Benton, Chicago.
- Hobbes, Thomas, 1952, *Leviathan*, William Benton, Chicago.
- Johnson, Doyle Paul, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2*, Gramedia, Jakarta.

Naturalisasi Perbudakan Sebagai Suatu Keadilan

- Kant, Immanuel, 1952, **Science of Right**, Trans. By W. Hastie, William Benton Chicago.
- Locke, John, 1952, **Concerning Civil Government Second Essay**, William Benton, Chicago.
- Mill, John Stuart, 1952, **Representative Government**, William Benton, Chicago.
- Montesquieu, Charles De, 1952, **The Spirit of Laws**, Trans. by Thomas Nugent, William Benton, Chicago.
- Rousseau, Jean Jacques, 1952, **A Discourse on the Origin of Inequality**, Trans. By G. D. H. Cole, William Benton, Chicago.
- _____, 1952, **The Social Contract**, Tarns. by G. D. H. Cole, William Benton.
- Scott, James C., 2000, **Senjatanya Orang-orang yang Kalah**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.